

ABSTRACT

As the supreme source of law, the 1945 Constitution is the most important written discourse of the Republic of Indonesia. This study is conducted to reveal the ideological postures behind representations of the social actors in it, employing social actor network in van Leeuwen's framework of discourse as recontextualization of social practice (1993). The analysis is separated into two stages, those are, the analysis of the preamble part and the analysis of the body part.

The result shows that the 1945 Constitution presents 29 social actors in total. In the preamble part, civilians and the executive agent are presented as the main actors. Civilians in this part are represented in total inclusion and specification, thus as the more dominant actor than the executive agent that is presented in partial exclusion and genericization. The preamble part therefore introduces some elements of socialism, as in socialism civilians are more dominant topic of discussions than the executive, and it constitutes as the most dominant ideological posture. In the body part, civilians, the executive, legislative and judicative agents are presented as the main actors. The executive, legislative and judicative agents tend to be represented in inclusion, activation, and functionalization. Consequently they are conceived as the most dominant actors among others. On the other hand, civilians are inclined in partial exclusion, assimilation, and classification, thus as the minor actor. This suggests that the text of the body part introduces some elements of democracy, as in democracy the state actors are more dominant topic of discussions than civil actors. In addition, the body part attempts to establish democracy as the most dominant ideological posture. As a result, interestingly, the body part tends to alter the ideology of socialism that is previously introduced in the preamble part, into the ideology of democracy. It indicates, to some extent, that the ideological posture in the text of preamble part is not in conformity with the ideological posture in the text of body part.

Key words: social actor network, the 1945 Constitution, ideological posture.

ABSTRAK

Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-undang Dasar 1945 merupakan diskursus tertulis yang paling penting di Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap postur ideologi di balik representasi aktor sosial di dalamnya, menggunakan jaringan aktor sosial dalam kerangka diskursus van Leeuwen, yaitu rekontekstualisasi praktek sosial (1993). Analisis penelitian ini dibagi ke dalam dua tahap, yaitu analisis bagian pembukaan dan analisis bagian batang tubuh.

Hasil analisa menunjukkan bahwa UUD '45 memperlihatkan 29 aktor sosial secara keseluruhan. Di bagian pembukaan, aktor sipil dan agen eksekutif digambarkan sebagai aktor utama. Pada bagian ini, aktor sipil digambarkan dalam inklusi total dan spesifikasi, sehingga menjadi aktor yang lebih dominan daripada agen eksekutif yang digambarkan dalam eksklusi parsial dan generikisasi. Dengan demikian, bagian pembukaan UUD '45 mengandung beberapa elemen sosialisme, karena dalam sosialisme aktor sipil merupakan topik diskusi yang lebih dominan daripada aktor eksekutif, dan sosialisme ini menjadi postur ideologi yang paling dominan di bagian pembukaan. Di bagian batang tubuh, aktor sipil, agen eksekutif, legislatif, dan yudikatif cenderung digambarkan dalam inklusi, aktifasi, dan fungsionalisasi. Sebagai konsekuensinya, mereka dipahami sebagai aktor-aktor yang lebih dominan daripada aktor lain. Di sisi lain, aktor sipil cenderung digambarkan dalam eksklusi parsial, asimilasi, dan klasifikasi, sehingga menjadi aktor minor. Ini memberi kesan bahwa bagian batang tubuh mengandung beberapa elemen demokrasi, karena dalam demokrasi aktor negara menjadi topik diskusi yang lebih dominan daripada aktor sipil. Lebih jauh, bagian batang tubuh UUD '45 berusaha membentuk demokrasi sebagai postur ideologi yang paling dominan. Hasilnya, bagian batang tubuh cenderung merubah ideologi sosialisme yang sebelumnya dikenalkan di bagian pembukaan, menjadi ideologi demokrasi. Ini mengindikasikan, pada tahap tertentu, postur ideologi pada bagian pembukaan tidak sesuai dengan postur ideologi pada bagian batang tubuh.

Kata kunci: jaringan aktor sosial, Undang-undang 1945, postur ideologi.